



RENCANA KERJA TA 2026

**Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
KOTA MAGELANG**

-  <https://bpbdmagelangkota.go.id>
-  bpbdkotamagelang@gmail.com
-  (0293)3193701

Jl. Lamtoro No. 71 Tidar Baru Kota Magelang

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, karunia serta hidaya-Nya sehingga Penyusunan Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Menyusun Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang – undang 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan mengacu pada dokumen perencanaan lima tahunan SKPD Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang 2025 – 2029 maka selanjutnya disusun dokumen perencanaan tahunan SKPD Dokumen Rencana Kerja SKPD. Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan ke – 4 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2026.

Pada penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2026 ini, memuat program kegiatan yang dimaksudkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana kerja BPBD Kota Magelang tahun 2026 ini.

Magelang, Juli 2025

KERALA PELAKSANA
BPBD KOTA MAGELANG



MACHBUB YANTARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001

Daftar Isi

Contents

Cover i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Renja SKPD 7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 11

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 26

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 39

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 56

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 58

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 58

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 59

3.3 Program dan Kegiatan..... 60

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 74

BAB V PENUTUP..... 78

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Jumlah kejadian di Kota Magelang sampai dengan TW II tahun 2024.....15

Tabel 2. 2 Jumlah Kerugian dan Korban terdampak Bencana Tahun 2024.....15

Tabel 2. 3 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target
Kinerja Program/Kegiatan.....20

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.....1

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Magelang21

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 BPBD Kota Magelang
.....42

Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2025 Kota Magelang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....57

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Magelang66

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2026. Penyusunan Renja ini merupakan implementasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang proses penyusunannya diawali melalui mekanisme partisipatif, dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Tahun 2026 merupakan tahun transisi perencanaan, karena berada pada akhir periode Renstra BPBD Kota Magelang Tahun 2022–2026 sekaligus menjadi awal penjabaran arah kebijakan Renstra BPBD Kota Magelang Periode 2025–2029. Pada periode 2022–2026, BPBD Kota Magelang mendukung misi pembangunan daerah yaitu “Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur”. Sementara itu, pada periode Renstra 2025–2029, BPBD mendukung Misi ke-2 Pemerintah Kota Magelang yaitu “Meningkatnya Infrastruktur yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan”. Dengan demikian, Renja Tahun 2026 menjadi dokumen strategis yang menjembatani kesinambungan kebijakan antar periode perencanaan. Arah kebijakan RKPD Kota Magelang Tahun 2026 mengusung tema “Melaju untuk Maju Sehat dan Bahagia” dengan arah kebijakan “Penguatan Kota Magelang yang Maju Menuju Masyarakat yang Sehat dan Bahagia” serta fokus pada:

1. Perwujudan kesejahteraan masyarakat;
2. Perwujudan pemberdayaan masyarakat;
3. Perwujudan ruang kota yang layak huni.

Sejalan dengan tugas BPBD dalam membantu Wali Kota melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat,

dan pascabencana secara terintegrasi, isu strategis yang relevan dalam RKPD Tahun 2026 adalah penguatan ketahanan daerah terhadap pangan dan bencana. Upaya tersebut dilaksanakan melalui optimalisasi penanggulangan bencana pada tahap prabencana, antara lain melalui peningkatan kegiatan sosialisasi, informasi, edukasi, dan pelatihan kepada satuan petugas, relawan, Tim Reaksi Cepat, serta masyarakat; pembentukan kelurahan tangguh bencana di seluruh kelurahan; serta penyusunan dan pemutakhiran dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Penyusunan Renja BPBD Tahun 2026 juga tidak terlepas dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044 sebagai pedoman nasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. RIPB disusun sebagai respons atas meningkatnya risiko dan kompleksitas bencana di Indonesia, baik yang bersifat hidrometeorologis akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan, maupun bencana geologis seperti letusan gunung api dan gempa bumi. Sasaran RIPB antara lain meliputi penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan, peningkatan investasi kesiapsiagaan, peningkatan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan akuntabel, serta percepatan pemulihan pascabencana yang lebih baik dan lebih aman. Secara nasional, Renja BPBD Tahun 2026 juga mendukung Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu *“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”*, dengan sasaran pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketahanan terhadap bencana merupakan prasyarat penting untuk menjaga stabilitas pembangunan dan melindungi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Selain itu, Renja BPBD Tahun 2026 juga memperhatikan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, peningkatan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah.

Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta mandat kelembagaan BPBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2026 disusun untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan indikatif yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Melalui Renja Tahun 2026, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Magelang dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi, profesional, dan

berorientasi pada pengurangan risiko, sehingga mendukung terwujudnya Kota Magelang yang semakin maju, sehat, dan bahagia serta berdaya tahan terhadap bencana.

1.2 Landasan Hukum

Renja SKPD BPBD Kota Magelang Tahun 2026 disusun berdasarkan pada:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33);
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan

- Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
 21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2026 Nomor 7)
 24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-20292029 (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran L;asifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang.
36. Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 000.7.2.4/090/100 Tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD BPBD Kota Magelang sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026. Maksud dari penyusunan Renja OPD ini adalah:

1. Memberikan pedoman bagi BPBD Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD)
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026
3. Sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja tahunan.

Adapun tujuan Renja OPD BPBD Kota Magelang Tahun 2026, yakni:

1. Untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan guna mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.
2. Untuk menciptakan sinergitas dalam implementasi pembangunan daerah antar wilayah dan antar sektor pembangunan, serta antar tingkat pemerintahan.
3. Untuk efisiensi alokasi sumber daya dalam kualitas pembangunan daerah

1.4 Sistematika Renja SKPD

Sistematika Renja OPD BPBD Kota Magelang Tahun 2026 diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tenang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Mengurai pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis progra,/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi penjelasan umum rencana kerja yang mencakup program dan kegiatan perangkat daerah, beserta pagu anggarannya.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan atau poin penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tidak lanjut

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 secara umum menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program tahun berikutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan renja ini dilakukan dengan meninjau aspek perencanaan penganggaran. Pada aspek perencanaan dan panganggaran, pada tahun 2024 jumlah anggaran sebesar Rp. 4.592.438.879,- terrealisir sebesar Rp. 4.422.939.211,- atau sebesar 96.31%, terdistribusi dalam 4 triwulan yaitu:

1. Triwulan I sebesar Rp. 764.783.427,- atau sebesar 16.65%
2. Triwulan II sebesar Rp. 2.292.682.211 atau sebesar 49.97%
3. Triwulan II sebesar Rp. 3.317.916.810 atau sebesar 72.25% dan,
4. Triwulan IV sebesar Rp. 4.422.939.211 atau sebesar 96.31%

Jika dilihat sejak berdirinya, penganggaran yang disediakan untuk BPBD Kota Magelang terus mengalami fluktuasi sampai dengan tahun 2025. Namun demikian penyerapan anggaran terbaik terjadi pada tahun 2024. Kendati serapan anggaran tahun 2024 tergolong tinggi, namun masih ditemukan kegiatan dengan tingkat realisasi yang rendah, bahkan ada yang tidak terserap sama sekali. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan masih memerlukan perbaikan agar lebih tepat. Oleh karena itu, evaluasi yang lebih detil dan terarah perlu dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab hambatan serta memastikan langkah perbaikan. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan mampu mendukung pencapaian target kinerja secara menyeluruh. Secara rinci program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target, melebihi target dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target :**

1. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
anggaran sebesar Rp. 8,354.000- realisasi Rp. 0,- target
kinerja juga 0, hal ini disebabkan karena Sub kegiatan

Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana merupakan suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran dalam suatu organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando setelah ditetapkan status tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah.

2. Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana kab/kota, meskipun memenuhi target namun untuk sub kegiatan ini serapan anggarannya sangat rendah sebesar Rp. 255.000,- atau 7.29% dari total anggaran Rp. 3.500.000,-. Sub Kegiatan Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim lintas sektoral yang berwenang terkait pencarian dan pertolongan korban bencana. Kegiatan dilakukan sesaat setelah diterima laporan dari tim kaji cepat akan adanya korban bencana yang perlu dilakukan upaya pencarian, pertolongan dan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Sifat kegiatan ini berupa kegiatan cadangan dimana bila tidak ada kejadian yang memerlukan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana maka anggaran tidak dapat direalisasikan.

➤ Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah mencapai target :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
2. Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan Perubahan RKA SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD
6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
8. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
9. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12. Penyediaan bahan logistik kantor
13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
14. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15. Penyediaan bahan/material
16. Fasilitasi kunjungan tamu
17. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Penyediaan jasa surat menyurat
20. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
21. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
22. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
23. Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan
24. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
25. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
26. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota
27. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
28. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
29. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
30. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana

kab/kota

31. Penyusunan rencana kontijensi
32. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kab/kota
33. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kab/kota
34. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
35. Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota
36. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

➤ Program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target

NIHIL

Program kegiatan di tahun 2024 dilihat dari sisi pelaksanaan kegiatan, mayoritas kegiatan dapat diselesaikan sesuai target keluaran (output) yang telah ditetapkan. Namun demikian untuk penyelesaian administrasi masih perlu untuk diefisienkan waktu penyelesaiannya. Secara keseluruhan, pelaksanaan Renja tahun 2024 dapat dinilai cukup efektif, meskipun membutuhkan sejumlah penyempurnaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting untuk memperbaiki perencanaan Renja tahun berjalan agar lebih tepat sasaran, berorientasi hasil (outcome), dan mampu menjawab tantangan di lapangan, perlu adanya perubahan dalam perencanaan, agar anggaran terserap secara maksimal.

Meskipun serapan anggaran pada beberapa jenis belanja menunjukkan capaian yang cukup tinggi, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Hal ini terlihat dari tingginya angka kejadian bencana di Kota Magelang, yang sepanjang tahun 2024 tercatat mencapai 56 kejadian. Frekuensi tersebut menunjukkan bahwa Kota Magelang berada pada tingkat kerawanan yang cukup memerlukan kewaspadaan, terutama terhadap bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, banjir, dan tanah longsor. Tingginya intensitas bencana ini menegaskan bahwa realisasi anggaran, khususnya pada program penanggulangan bencana yang secara langsung mendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, menjadi faktor kunci untuk memperkuat kapasitas daerah. Terlebih lagi, setiap kejadian bencana tidak hanya menimbulkan gangguan fisik pada infrastruktur, permukiman, tetapi juga berdampak pada kerugian. Kerugian tersebut mencakup kerusakan yang membutuhkan penanganan pascabencana serta memerlukan

dukungan. Dengan intensitas kejadian yang cukup tinggi, optimalisasi serapan anggaran tidak hanya diperlukan untuk memenuhi target kinerja, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh perangkat, prosedur, dan sumber daya penanganan bencana dapat berfungsi secara optimal saat bencana terjadi. Adapun data kejadian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah kejadian di Kota Magelang sampai dengan TW II tahun 2024

	LONGSOR	BANJIR	ANGIN KENCANG	KEBAKARAN LAHAN	KEBAKARAN RUMAH	LAIN-LAIN	Total
Magelang Selatan	2	0	0	0	1	19	22
Magelang Utara	2	1	0	0	2	11	16
Magelang Tengah	7	0	0	0	2	9	18
TOTAL	11	1	0	0	5	39	56
	LONGSOR	BANJIR	ANGIN KENCANG	KEBAKARAN LAHAN	KEBAKARAN RUMAH	LAIN LAIN	Total
KEJADIAN 2024	11	1	0	0	5	39	56

Sumber Data : PUSDALOPS BPBD Kota Magelang
https://linktr.ee/bpbdkotamagelang?utm_source=linktree_admin_share

Tabel 2. 2 Jumlah Kerugian dan Korban terdampak Bencana Tahun 2024

No	Hari/tanggal	Lokasi (RT/RW)	Jenis Kejadian	Est Kerusakan	Jumlah Korban		
					luka ringan	luka berat	MD
1	07 Januari 2024	Jl. Sunan Giri RT.03 RW.06	Pohon tumbang	500.000,00	1		
2	08 Januari 2024	Samban Utara Rt. 8 RW 6	Pohon tumbang	5.000.000,00			
3	09 Januari 2024	Kp. Tidar Dudan	Atap Roboh	20.000.000,00			
4	10 Januari 2024	Botton Kopen	Pohon tumbang	5.000.000,00			
5	20 Januari 2024	Jl. Buton Kedungsari	Pohon tumbang	13.000.000,00			
6	26 Januari 2024	Kedungsari RT.006/RW.007	Rumah roboh	50.000.000,00	3		
7	4 Februari 2024	Kemirirejo	Atap Roboh	15.000.000,00			
8	15 Februari 2024	Jl. Jeruk Timur III RT.02/RW.01	Kebakaran Rumah	10.000.000,00			
10	25 Februari 2024	Kemirirejo RT.04/RW.07	Talud drainase roboh	20.000.000,00			
11	7 Maret 2024	Kampung Tulung RT.01/RW.02	Tanah Longsor	3.500.000,00			
12	7 Maret 2024	Jambon Tengah No. 301 RT.04/RW.03	Tanah Longsor	15.000.000,00			
13	7 Maret 2024	Ganten RT 09 RW 01 Jurangombo Selatan	Pohon tumbang	2.000.000,00			
14	25 Mei 2024	Potrobangsari 3, RT.01/RW.05	Talud Longsor	25.000.000,00			
15	11 September 2024	Magersari Timur No. 213	Rumah roboh	5.000.000,00			
16	24 September 2024	Area Parkir Gedung I FKIP Untid Kel. Potrobangsari, K MU	Pohon tumbang	1.000.000,00			
17	3 November 2024	Kiringan RT.06/RW.02, Kel. Tidar Utara	pohon kelapa tumbang	5.000.000,00			
18	3 November 2024	Malangan RT.03/RW.13, Kel. Tidar Utara	Talud Longsor	40.000.000,00			
19	18 November 2024	Perumahan Karet, Jl. Sunan Bonang RT. 02/RW. 05, Jurangombo Selatan Koordinat : -7.497736, 110.208116	Kebakaran Rumah	250.000.000,00			
20	28 November 2024	Jambon Wot RT08 RW06Koordinat : -7.480030, 110.212949	Kebakaran Rumah	90.000.000,00			
21	5 Desember 2024	Kp. Kalisari RT. 02 RW. 08 Kel. Wates, Kec. Magelang Utara	Kompas Gas Meledak	4.000.000,00	1		
22	11 Desember 2024	Meteseh Krajan RT01/RW.10Koordinat : -7.471778, 110.214389	Atap Rumah Roboh	7.000.000,00			
23	16 Desember 2024	Kp. Paten Jurang RT.03 RW. 16 Kel. Rejowinangun utara	Atap Rumah Roboh	7.000.000,00			
24	16 Desember 2024	Kp. Jambon Gesikan RT. 02 RW. 04 Kel. Cacaban	Atap Rumah Roboh	7.000.000,00			
25	28 Desember 2024	Cacaban Barat RT.04/RW.09	Kebakaran Rumah	30.000.000,00			
				630.000.000,00	5	0	1

Sumber Data : PUSDALOPS BPBD Kota Magelang
https://linktr.ee/bpbdkotamagelang?utm_source=linktree_admin_share

Meskipun intensitas bencana di Kota Magelang sepanjang tahun 2024 mencapai 56 kejadian, seluruh kejadian tersebut pada prinsipnya telah dapat ditangani, baik pada fase kedaruratan maupun melalui langkah-langkah penanganan lanjutan pada tahap pascabencana, untuk kasus yang memerlukan dukungan lanjutan,

pemerintah daerah bersama lembaga mitra memberikan penanganan pascabencana secara terkoordinasi.

Pada tahap pascabencana, terdapat 14 kegiatan yang mendapatkan dukungan lanjutan berupa bantuan tunai dari dua lembaga kemanusiaan daerah, yaitu PMI dan BAZNAS Kota Magelang. PMI Kota Magelang menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp 23.250.000,-, sedangkan BAZNAS Kota Magelang memberikan dukungan bantuan tunai senilai Rp 60.750.000,-. Bantuan ini ditujukan untuk membantu pemulihan kondisi sosial ekonomi warga terdampak, termasuk perbaikan kerusakan ringan pada rumah, pemenuhan kebutuhan dasar, serta mendukung keberlanjutan aktivitas masyarakat pascabencana.

Cukup tingginya intensitas kejadian dan kebutuhan bantuan lanjutan menggarisbawahi pentingnya optimalisasi serapan anggaran pada program-program penanggulangan bencana di tahun mendatang, agar kapasitas kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan dapat semakin diperkuat

Serapan anggaran pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II terbilang cukup rendah. Setelah memasuki proses penatausahaan tahun 2025, pada awal tahun tersebut keluar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025, atas instruksi presiden tersebut keluarlah perintah kepada dua kementerian, yaitu :

- ✓ Kementerian Keuangan untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing Kementerian/Lembaga tahun 2025 dengan terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025, dan
- ✓ Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemantauan efisiensi belanja yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan

APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 23 Februari 2025.

Atas dikeluarkannya tiga kebijakan pemerintah tersebut, oleh Pemerintah Kota Magelang ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 900/129/440 tanggal 4 Maret 2025 tentang Tidak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Langkah-langkah penyesuaian Pemerintah Kota Magelang dalam menindaklanjuti dituangkan kedalam Surat Edaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang tersebut antara lain :

- ❖ pengurangan/efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 50 % (lima puluh persen) dari anggaran untuk seluruh perangkat daerah.
- ❖ Pengurangan / efisiensi anggaran belanja-belanja tersebut di bawah ini masing- masing sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tiap-tiap perangkat daerah, yaitu:
 - 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
 - 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
 - 3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 - 4) Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - 5) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - 6) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - 7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - 8) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat

Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang;

9) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat

Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua;

10) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan

Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor;

11) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software;

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Wali Kota Magelang inilah, maka dilakukan penggeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 tanggal 15 April 2025. Jeda waktu antara terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 900/129/440 tanggal 4 Maret 2025 tentang Tidak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini mengakibatkan ketidakpastian, keragu-raguan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 khususnya pada BPBD Kota Magelang, sehingga hal ini berdampak rendahnya serapan anggaran. Setelah dilakukan efisiensi, perlu adanya tindakan kehati-hatian, kecermatan didalam pelaksanaan anggaran sampai dengan penetapan APBD penggeseran tahun 2025, hal ini untuk mengantisi, agar pelaksanaan anggaran tidak melampaui pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi. Anggaran Belanja pada BPBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 5.134.501.423,-, anggaran hasil efisiensi sebesar Rp. 4.928.526.185,- berkurang sebesar Rp. 205.965.238,- atau 4.18%. Terdiri dari anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 4.073.831.185,-, hasil penggeseran berkurang Rp. 71.869.057,- atau sebesar 0.017%, sedangkan program penanggulangan bencana sebesar Rp. 854.705.001,- hasil penggeseran berkurang Rp. 134.096.180,- atau sebesar 0.14%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II, sebesar Rp.

2.097.841.691 atau sebesar 42.57%, dengan rincian triwulan sebagai berikut :

1. Triwulan I realisasi Rp. 764.783.427,- atau sebesar 16.65% berdasarkan anggaran penetapan
2. Triwulan II realisasi Rp. 2.292.683.211,- atau sebesar 42.57% berdasarkan penggeseran/efisiensi anggaran.

Serapan pada belanja pegawai menjadi komponen dengan realisasi anggaran tertinggi, disamping secara penganggaran, belanja pegawai menempati anggaran paling tinggi dibandingkan dengan belanja yang lain, dan juga karena merupakan belanja wajib. Realisasi untuk anggaran belanja yang langsung mendukung indikator kinerja utama sebesar Rp. 202.959.004,- atau sebesar 24.36% berdasarkan jumlah anggaran secara keseluruhan. Sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar 57.58% atau sebesar 2.827.851.135,- terdiri dari target untuk program penanggulangan bencana sebesar 33.43% atau sebesar 285.727.881,-, terdapat gap serapan anggaran pada program penanggulangan bencana sebesar 9.07% atau sebesar Rp.77.521.743,- . Kondisi yang sama terjadi terkait serapan anggaran pada tahun anggaran 2024 dan 2025, bahwa pada dua tahun tersebut terdapat sub kegiatan yang sama-sama mandatori SPM, serapan rendah, bahkan tidak terserap sama sekali yaitu sub kegiatan Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/kota tahun anggaran 2024 anggaran sebesar Rp.3.500.000,- hanya terserap Rp. 255.000,- atau sebesar 7.29%, sedangkan tahun anggaran 2025 sebesar Rp.9.600.000,- terserap Rp.855.000,- , dan sub kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, anggaran tahun 2024 sebesar Rp.8.354.000,-, tahun 2025 sebesar Rp. 23.285.700,- dan tidak terserap sama sekali. Adanya efisiensi ini, mengakibatkan perlu adanya perubahan dalam struktur penganggaran, pada perubahan anggaran tahun 2025.

Terhadap hasil pelaksanaan kegiatan terdapat faktor penyebab baik yang telah sesuai target, tidak sesuai target dan melebihi target. Adapun faktor tidak tercapainya, tercapai, dan capaian yang melebihi target kinerja dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

No	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program /Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.	Sub kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana pada program penanggulangan tidak harus terealisasi/terserap, dikarenakan bahwa terdapat sub kegiatan yang sifatnya sebagai anggaran cadangan bila terjadi bencana yang mengakibatkan adanya kegiatan yang membutuhkan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, serta kegiatan yang memerlukan penetapan status tanggap darurat oleh Kepada Daerah serta kejadian bencana yang terjadi di Kota Magelang pada tahun berjalan tidak memenuhi kriteria untuk penyusunan dan penetapan dokumen R3P	-	-	Perubahan struktur penganggaran pada tahun berikutnya agar serapan anggaran lebih maksimal
2.		Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sesuai dengan penempatan anggaran	-	Memperkuat perencanaan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat monitoring dan

No	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program /Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/ Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
		kas		evaluasi berkala, memastikan pelaksanaan kegiatan tetap konsisten dan potensi keterlambatan dapat diantisipasi
3			NIHIL	

Akibat / dampak terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah serta kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab diatas :

1. Bencana pada dasarnya merupakan kejadian yang tidak dapat direncanakan, namun untuk meminimalisir dampak serius sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia maupun dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan melampaui batas kemampuan masyarakat yang bersangkutan maka perlu adanya manajemen bencana yang dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah – langkah dalam rangka kesiapsiagaan dan pencegahan pada parencanaan dan penganggaran merupakan hal yang utama untuk disediakan. Dalam konteks Kota Magelang, kejadian bencana yang terjadi sepanjang tahun tidak masuk dalam kategori bencana besar dan relatif dapat ditangani secara cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola risiko di Kota Magelang cenderung pada kejadian berskala kecil yang lebih membutuhkan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan dibandingkan penanganan darurat berskala besar. Oleh karena itu, agar capaian program dalam Renstra Perangkat Daerah tetap optimal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur penganggaran dengan mempertimbangkan karakteristik kejadian bencana di wilayah Kota Magelang. Penyesuaian tersebut mencakup realokasi anggaran dari kegiatan yang menitikberatkan pada respons darurat menuju kegiatan mitigasi, edukasi

masyarakat, peningkatan kapasitas relawan, pemantauan risiko, serta penguatan sistem peringatan dini. Pendekatan ini tidak hanya memastikan efektivitas serapan anggaran, tetapi juga meningkatkan kontribusi nyata kegiatan kebencanaan terhadap pencapaian tujuan Renstra. Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran perangkat daerah dapat lebih adaptif terhadap kondisi Kota Magelang serta lebih mampu mendukung upaya pengurangan risiko dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta mempertahankan serapan anggaran lebih baik, diperlukan upaya yang lebih terstruktur melalui penguatan perencanaan, percepatan proses administrasi, dan penguatan monitoring serta evaluasi secara berkala. Penguatan perencanaan penting dilakukan agar setiap kegiatan yang dirancang benar-benar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan dan mampu mengantisipasi dinamika risiko bencana yang mungkin muncul. Perencanaan yang lebih matang juga memungkinkan penentuan target dan jadwal kegiatan yang lebih realistis, sehingga peluang terjadinya keterlambatan pelaksanaan dapat ditekan sejak awal.

Selanjutnya, percepatan proses administrasi menjadi faktor kunci dalam memastikan kegiatan dapat berjalan tepat waktu.. Administrasi yang cepat dan akuntabel akan meminimalkan hambatan birokrasi yang berpotensi menghambat realisasi anggaran.

Di samping itu, monitoring dan evaluasi berkala harus diperkuat sebagai mekanisme pengendalian internal. Melalui Monev yang dilakukan secara rutin, perangkat daerah dapat mengidentifikasi potensi keterlambatan, kekurangan dokumen, atau deviasi pelaksanaan sejak dini. Dengan demikian, langkah korektif dapat segera diambil sebelum berdampak terhadap capaian kinerja secara keseluruhan. Monitoring yang efektif juga memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap konsisten dengan sasaran program, sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas output yang dihasilkan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah di sajikan pada table berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		keuangan dan capaian kinerja								
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	7 dokumen	1.75%
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	1%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	1%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	1%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	1%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	13 dokumen	13 laporan	13 laporan	100%	13 laporan	39 laporan	9.75%
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	20 orang	17 orang	16 orang	100%	20 orang	27 orang	14%
	Pelaksanaan Penatausahaan	Jumlah Dokumen	-	12	12	12		-	-	6%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen	dokumen	dokumen	100%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	0.75%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	-	12 laporan	12 laopran	6%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum Yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	12 paket	1 paket	1 paket	100%	4 paket	17 paket	4.25%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan-	1 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	2 paket	14 paket	3.5%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket /...Bahan Logistik Kantor yang	3 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	9%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Disediakan								
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	8 paket	20 paket	5%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	19 dokumen	4.75%
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	19 paket	18 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	42 paket	10.5%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	9%
	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	12	13	12	12	100%	12 lapran	36	9%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	laporan	laporan	laporan			laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit	3 unit	-	-	0	3 unit	6 unit	1.5%
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan	12	12	12	12	100%	12	36	9%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Menyurat	Jasa Surat Menyurat	laporan	laporan	laporan	laporan		laporan	laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	9%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	36 laporan	9%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 unit	11 unit	11 unit	11 unit	100%	11 unit	33 unit	8.25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	6 unit	1.5%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang dipelihara	24 unit	8 unit	-	-	-	-	8 unit	2%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	13 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	29 unit	7.25%
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	0.75%
	Program penanggulangan bencana	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	0.35%
	Sosialisasi, Komunikasi,	Jumlah warga negara	150 org	150	120	120	100%	60 orang	330	82.5%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		bencana								
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	6 unit	20 unit	20 buah	20 unit	100%	16 unit	56 unit	14%
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	70 orang	100 orang	175 orang	100 orang	100%	150 orang	350 orang	87.5%
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan	2 kawasan	3 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	100%	2 kawasan	7 kawasan	1.75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kesiapsiagaan Bencana								
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	70 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	90 orang	22.5%
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	100%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	9%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		tinggalnya								
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	100%	3 kawasan	9 kawasan	2.25%
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
	Respon Cepat Kejadian	Jumlah Laporan Koordinasi	4 laporan	4	4	4 lapran	100%	4 laporan	12	3%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		laporan	laporan				laporan	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	-	1 dokumen	-	100%	1 dokumen	-	0%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	3 orang	0.75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60 orang	5 orang	20 Orang	43 orang	100%	25 orang	73 orang	18.25%
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 laporan	-	1 laporan	0	0%	1 laporan	0	100%
	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase jumlah dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
	Koordinasi dan Penanganan	Jumlah penyelesaian	12	0	12	-	100%	12	24	6%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pasca Bencana	kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	kegiatan		kegiatan			kegiatan		

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau pelayanan dalam periode tertentu, yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi atau perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Capaian kinerja tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas output yang dihasilkan, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan, ketepatan waktu, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, capaian kinerja menjadi instrument penting dalam menilai efektivitas, akuntabilitas, transparansi penyelenggaraan pemerintah. Dalam konteks pelayanan publik, capaian kinerja menunjukkan sejauh mana layanan yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian ini menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, area yang perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, BPBD Kota Magelang telah menunjukkan kinerja pelayanan yang cukup baik dan konsisten. Pemenuhan SPM tidak hanya diukur dari kecepatan dan ketepatan respons saat terjadi bencana, tetapi juga dari upaya sistematis dalam pengurangan risiko bencana melalui kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang meliputi:

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Berdasarkan regulasi tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan BPBD Kota Magelang seperti sosialisasi kebencanaan, edukasi masyarakat, pelatihan kesiapsiagaan, pelaksanaan apel siaga bencana, serta penguatan kapasitas masyarakat merupakan bagian dari pemenuhan indikator pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri tersebut.

Selain itu, penyusunan dokumen kebencanaan seperti kajian risiko bencana, rencana kontinjensi, serta dokumen perencanaan lainnya juga merupakan implementasi nyata dari pendekatan manajemen risiko bencana yang komprehensif. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan BPBD Kota Magelang tidak hanya berorientasi pada aspek reaktif (tanggap darurat), tetapi juga pada aspek preventif dan mitigatif.

Selain kinerja pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, capaian kinerja BPBD Kota Magelang juga diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan pembagian dan kewenangan masing-masing urusan. Dalam konteks BPBD, indikator kinerja kunci berada pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, khususnya bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Sub urusan bencana menjadi bagian dari urusan tersebut, sehingga capaian kinerja BPBD tidak hanya dinilai dari pemenuhan standar pelayanan minimal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana. Dengan demikian, pengukuran kinerja BPBD Kota Magelang melalui IKK mencerminkan sejauh mana penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana mampu mendukung terciptanya rasa aman, perlindungan, dan ketahanan masyarakat. Dalam ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat indikator kinerja kunci BPBD difokuskan pada :

1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana dan Indikator Kinerja Kunci di sajikan pada table berikut:

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase penyelesaian dokumen (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	√		100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yg memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase penyelesaian dokumen (RPB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	√		100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	
4	Persentase penyelesaian dokumen (RENKON) sampai dengan dinyatakan sah/legal	√		100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase jumlah warga negara yg mendapat peralatan perlindungan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pada tahun 2025 tidak kejadian

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												yang ditetapkan sebagai stautsu KLB
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pada tahun 2025 tidak ada kejadian yang ditetapkan sebagai status

[illegible]

[illegible]

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penilaian kinerja pelayanan tidak hanya diukur dari realisasi program dan kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan tersebut mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan, memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengukuran tingkat kinerja pelayanan dilakukan melalui indikator yang terukur, baik yang bersumber dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), maupun indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah seperti Indikator Kinerja Utama (IKU). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan memiliki output dan outcome yang jelas serta dapat dievaluasi secara objektif. Kinerja tidak hanya dilihat dari kecepatan dan ketepatan respons terhadap kejadian, tetapi juga dari efektivitas upaya pencegahan, kesiapsiagaan, serta pemulihan pascabencana. Dengan demikian, evaluasi tingkat kinerja pelayanan menjadi instrumen penting dalam menilai kualitas perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sekaligus sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sampai saat ini capaian indikator SPM berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum terpenuhi, yang disebabkan oleh belum dilakukannya legalisasi terhadap dokumen kebencanaan yang telah disusun. Sedangkan atas capaian indikator kinerja utama berupa indikator tujuan perangkat daerah yaitu Indeks Ketahanan Daerah sampai dengan semester I tahun 2025 belum dapat dilakukan penilaian, hal ini disebabkan proses penilaian IKD dilakukan melalui beberapa tahap, yang biasanya dimulai dengan sosialisasi penilaian IKD oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan peserta yang diundang BPBD dan BAPPEDA Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, namun sampai dengan saat ini tahapan tersebut belum dilakukan. Sehingga capai kinerja atas indikatot tujuan dan sasaran tahun 2025 sampai dengan semester I masih menggunakan hasil penilaian tahun 2024 yaitu :

- Indikator tujuan berupa Indeks Ketahanan Daerah dengan capaian 48, melampaui dari target sebesar 101.25% dari target 47.40.
- Indikator sasaran berupa :

- Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan dengan capaian sebesar 0.79
- Indeks Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu dengan capaian sebesar 0.700.63
- Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dengan capaian sebesar 0.75
- Indeks Prioritas Penanganan Teraatik Kawasan Rawan Bencana dengan capaian sebesar 0.44
- Indeks Prioritas Efektivitas Pencegehan dan Mitigasi Bencana dengan capaian sebesar 0.44
- Indeks Prioritas Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dengan capaian sebesar 0.34
- Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dengan capaian sebesar 0.36

Karena target indikator sasaran tahun 2024 belum dirinci sampai dengan prioritas penanggulangan bencana maka atas target tersebut berupa akumulasi dari tujuh prioritas penanggulangan bencana yaitu sebesar 47.40.

Hal-hal yang mempengaruhi capaian indikator tersebut antara lain :

- ❖ Rencana kontijensi yang disusun belum sepenuhnya diinternalisasikan dan dioperasionalkan melalui tahapan uji coba, seperti simulasi atau gladi yang seharusnya menjadi sarana untuk menguji kesiapan, kejelasan peran serta efektivitas mekanisme komando dan koordinasi saat terjadi bencana, bahkan sejumlah dokumen rencana kontijensi yang telah disusun belum ditetapkan secara formal. Kondisi ini berdampak belum optimalnya kesiapan kelembagaan BPBD dalam menghadapi potensi bencana secara nyata.
- ❖ Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang saat ini tersedia merupakan hasil penyusunan oleh BAPPERIDA Kota Magelang pada tahun 2018 dan berlaku untuk periode 2019-2023. Seiring berakhirnya masa berlaku dokumen tersebut, hingga saat ini belum dilakukan pemutakhiran, sehingga perencanaan penanggulangan bencana di daerah belum sepenuhnya didukung oleh dokumen strategis terkini dan sesuai dinamika risiko bencana terkini. Belum dilakukannya pemutakhiran

tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Pada tahap penyusunan Rencana Kerja BPBD Tahun 2025, kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebenarnya telah masuk dalam perencanaan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi hal yang mendesak dan perlu penggeseran prioritas kebutuhan, kebutuhan tersebut adalah terkait dengan bantuan sarana dan prasarana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa logistik dan peralatan kebencanaan, yang memerlukan fasilitas penyimpanan berupa gudang logistik dan peralatan. Kondisi gudang yang tersedia saat ini kurang representatif dan tidak memadai untuk menampung. Oleh karena itu untuk menjamin kesiapan operasional dan keamanan, anggaran yang semula dialokasikan untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dialihkan melalui perubahan anggaran untuk membiayai pembangunan gudang darlog. Kondisi ini berdampak tertundanya pemutakhiran Rencana Penanggulangan Bencana, sehingga memerlukan komitmen dan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. Namun kondisi keuangan Kota Magelang tahun anggaran 2026 yang kurang bahkan dikatakan minus, maka masuk pada Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026, anggaran penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dihilangkan, hal ini disebabkan, kebijakan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Magelang yang merasionalisasi anggaran penyusunan rencana penanggulangan bencana pada rekening Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, sebesar Rp. 200.000.000,-, dialokasikan untuk membiayai tenaga ahli atau pihak ke 3 yang ditunjuk guna menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana Kota Magelang, anggaran ini digunakan untuk mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan, mulai dari pengumpulan data, analisis risiko bencana, perumusan strategi, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional penanggulangan bencana.

Selain rasionalisasi pada subkegiatan rencana penanggulangan bencana, juga pada subkegiatan penyusunan rencana kontijensi pada rekening yang sama sebesar Rp. 70.000.000,-, sama halnya pada rekening ini adalah untuk membiayai tenaga ahli atau pihak ke 3 yang ditunjuk guna menyusun dokumen rencana kontijensi.

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, maka rekening belanja lain yang tercantum dalam kedua subkegiatan dimaksud tidak dapat direalisasikan apabila tetap dipertahankan pada subkegiatan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan ketersediaan anggaran agar tetap efektif dan tidak menjadi sisa lebih, alokasi anggaran tersebut dialihkan ke subkegiatan lain yang lebih prioritas dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program.

❖ Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Magelang yang telah disusun pada tahun 2023 bertujuan untuk :

- Menyusun kebijakan penanggulangan bencana, Dimana kebijakan ini nantinya merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana Pembangunan.
- Sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana.
- Sebagai salah satu dasar untuk Menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi,

Sampai dengan saat ini Dokumen Kajian Risiko Bencana belum dilakukan legalisasi, sehingga mengakibatkan beberapa indikator tidak tercapai, mengingat dokumen Kajian Risiko Bencana memang harus sampai pada tahap sah dan legal.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menghadapi berbagai isu penting yang mempengaruhi pelayanan penanggulangan bencana di daerah. Isu tersebut muncul dari aspek kelembagaan, pendanaan dan partisipasi masyarakat.

❖ Dari sisi kelembagaan kapasitas organisasi BPBD masih belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana, salah satunya belum terbetuknya forum pengurangan risiko bencana (FPRB) di daerah sebagai wadah koordinasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pengurangan risiko bencana belum terkoordinasi secara

sistematis dan masih berjalan secara sektoral, sehingga sinergi antar pemangku kepentingan belum terbangun secara efektif. Ketiadaan forum ini berdampak pada belum terbangunnya mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan dalam pengurangan risiko bencana. Akibatnya, pelaksanaan pengurangan risiko bencana masih cenderung berjalan secara sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi lintas pemangku kepentingan. Sinergi antar pihak yang seharusnya menjadi kekuatan dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana belum terbangun secara optimal. Selain itu penyusunan dokumen perencanaan kebencanaan, masih bersifat administratif. SDM BPBD Kota Magelang

- ❖ Kapasitas Sumber Daya Manusia BPBD Kota Magelang yang tidak merata.

Kebutuhan personil yang paling mendesak ada pada bidang pencegahan dan kesiapasisgaan. Bidang ini memiliki peran strategis dalam sistem penanggulangan bencana karena bertanggung jawab membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada fase prabencana, serta pemberdayaan Masyarakat. Fungsi ini menjadi sangat penting mengingat pendekatan pengurangan risiko bencana menitikberatkan pada upaya pencegahan yang sistematis, edukatif, dan partisipatif sebelum bencana terjadi. Dalam konteks ini, keberadaan personil yang kompeten dan memadai di bidang tersebut akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kegiatan seperti penyusunan kajian risiko, penguatan sistem peringatan dini, pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, penyuluhan dan edukasi masyarakat, serta penyusunan rencana kontinjensi dan SOP kedaruratan.

- ❖ Penyebaran informasi kebencanaan belum dilakukan secara optimal serta belum didukung oleh sistem pendataan yang terintegrasi dan akurat, sehingga mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat serta kurang optimalnya pengambilan keputusan dalam upaya penanggulangan bencana.

Kegiatan pelayanan penanggulangan bencana baik saat pra bencana , saat

bencana maupun pascabencana dapat terselesaikan dengan baik. Pada masa pra bencana , telah dilakukan kegiatan rutin berupa sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan secara tatap muka maupun sosialisasi melalui media, pada saat bencana/kedaruratan dengan melakukan pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi warga terkena bencana juga pemberian bantuan logistik kepada korban bencana maupun aktivitas lapangan yang dianggarkan melaui APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Magelang pada sub kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota serta pemberian bantuan tunai kepada warga, untuk pemberian bantuan tunai kepada masyarakat terdampak bencana BPBD Kota Magelang bekerjasama dengan PMI Kota Magelang dan BAZNAS. Dinamika penyelesaian kejadian bencana beberapa hal menjadi kendala dalam penyelesaiannya diantaranya :

1. Penanganan kejadian bencana pada prinsipnya dapat didukung melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan persyaratan, adanya penetapan status tanggap darurat oleh kepala daerah, namun demikian, dalam konteks kejadian yang terjadi di Kota Magelang, peristiwa tersebut belum memenuhi kriteria sebagai bencana yang dapat ditetapkan status tanggap daruratnya. Meskipun demikian, kondisi tersebut tetap memerlukan langkah penanganan agar dampaknya segera dapat tertangani. Menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya payung hukum atau dasar regulasi yang memadai sebagai landasan pengeluaran anggaran, sehingga pemerintah daerah tetap dapat mengalokasikan dan merealisasikan beanja untuk membantu penanganan tersebut. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pelaksanaan penanganan dapat dilakukan secara akuntabel, tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024 BPBD telah menyusun draf Peraturan Wali Kota Magelang tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DARURAT BENCANA YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG, pemberian bantuan dimaksud berupa bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat korban terdampak yang bertujuan membantu meringankan beban dan untuk meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi korban dampak bencana agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, namun sampai saat ini draf peraturan wali kota tersebut belum dapat digunakan karena belum sampai legalisasi.

2. Di dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa didalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BPBD mempunyai fungsi koordinasi, sedangkan menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang di maksud dengan Koordinasi adalah : kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi yang lakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat di dalam dan atau luar kantor; konsultasi; permintaan laporan, analisis dan umpan balik baik secara lisan maupun secara tertulis yang mengarah pada upaya penyelesaian persoalan yang dihadapi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan. Sedangkan masyarakat, lembaga masih beranggapan bahwa fungsi BPBD tidak hanya berfungsi dalam koordinasi, namun juga penyediaan/penganggaran pasca bencana.
3. Salah satu objek yang terdampak bencana adalah asset milik pemerintah daerah, sehingga dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksinya merupakan tanggung jawab pemilik asset, namun faktanya OPD penanggungjawab asset tersebut hanya menganggarkan belanja yang bersifat reguler (belum semua menyediakan anggaran sebagai cadangan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana)

Dari isu – isu tersebut dapat diidentifikasi permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:

1. Permasalahan :

- a. Belum adanya wadah kolaborasi multipihak
- b. Koordinasi lintas sektor yang belum terlembaga
- c. Kapasitas sumber daya manusia, awal penempatan sumber daya manusia pada BPBD Kota Magelang tidak dibarengi dengan kapasitas kemampuan dalam pelayanan penanggulangan bencana, sumber daya manusia yang dimiliki pada BPBD Kota Magelang sampai saat ini sejumlah 15 orang dari unsur PNS, 5 orang PPPK ditambah dengan

tenaga harian lepas sebanyak 9 orang secara keseluruhan personal yang dimiliki sebanyak 29 personil belum memiliki kemampuan yang memadai dan merata di bidang penanggulangan bencana.

- d. Belum optimalnya pelatihan serta sertifikasi kebencanaan
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bencana , tidak maksimalnya pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang rawan bencana.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial dan teknologi komunikasi

2. Hambatan :

- a. Keterbatasan anggaran
- b. Belum tersedianya regulasi yang mengatur pembiayaan pelatihan tenaga penanggulangan bencana yang berasal dari unsur non ASN/THL, menyebabkan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- c. Belum adanya SK kepala daerah yang menjadi dasar hukum pembentukan forum pengurangan risiko bencana
- d. Sering terjadinya mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang berdampak pada kerja BPBD Kota Magelang
- e. Belum adanya sarana pendukung berupa sistem peringatan dini
- f. Penanganan kejadian bencana dalam situasi darurat memerlukan skema pendanaan yang bersifat khusus dan dapat dicairkan secara cepat, yang pengaturannya perlu ditegaskan dalam perundang-undangan tersendiri agar memiliki kepastian hukum dan kemudahan dalam implementasinya.
- g. Belum seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan urusan penanggulangan bencana didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas

dan fungsi dalam penanggulangan bencana belum dapat berjalan secara optimal.

- h. Basis data penduduk yang detil dan tersegmentasi.

3. Peluang :

- a. Peningkatan sinergi dengan instansi vertikal serta kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana termasuk didalamnya pemenuhan kelengkapan sarana prasarana penanggulangan bencana, selain itu diperlukan optimalisasi koordinasi dengan unsur kewilayahan di Kota Magelang guna memperoleh data data penduduk yang terperinci dan akurat sebagai dasar perencanaan dan penanganan bencana.
- b. Dukungan regulasi yang mengamanatkan peran masyarakat seperti undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
- c. Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk sistem peringatan dini dan edukasi kebencanaan
- d. Peningkatan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana.
- e. Terdapat komitmen dan dukungan unsur legislatif maupun eksekutif yang diwujudkan melalui penguatan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, sehingga memberikan landasan kebijakan dan penganggaran yang lebih terarah..

4. Tantangan :

- a. Membangun komitmen dan sinergi multipihak secara berkelanjutan, bukan hanya saat terjadi bencana.
- b. Peningkatan SDM BPBD melalui diversifikais pendanaan
- c. Menciptakan inovasi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- d. Peningkatan kapasitas Sistem Informasi Kebencanaan yang telah dimiliki BPBD Kota Magelang
- e. Peningkatan budaya sadar bencana kepada aparatur dan masyarakat yang belum merata sehingga merubah paradigma responsif menjadi preventif (pengurangan risiko)
- f. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang menyentuh lini masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

Isu pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian visi, misi, program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) .

Dalam kerangka pembangunan nasional, tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik. Dalam struktur Prioritas Nasional, penanggulangan bencana berada pada prioritas ke delapan yaitu “ Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,. Sasaran yang relevan dengan penanggulangan bencana adalah Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 8, dilaksanakan intervensi kebijakan , intervensi kebijakan yang relevan dengan tugas dan fungsi BPBD adalah :

1. Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dengan sasaran Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana, indikatornya Persentase Daerah yang Memiliki Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana Minimal pada Kategori Sedang (%), target th 2026 72. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, sebagai upaya untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, dilaksanakan melalui (i) pendidikan,

pelatihan, dan simulasi untuk peningkatan kapasitas bidang penanggulangan bencana; (ii) pengembangan mitigasi bencana melalui riset dan inovasi; (iii) koordinasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan bidang penanggulangan bencana; dan (iv) penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan standar.

Pada intervensi kebijakan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah, Namun demikian, capaian indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah isu strategis yang saat ini dihadapi BPBD, antara lain belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai wadah kolaborasi multipihak, keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM kebencanaan, serta belum optimalnya penyebaran dan integrasi informasi kebencanaan. Belum terbentuknya FPRB berdampak pada kurang optimalnya sinergi lintas sektor dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterbatasan SDM berimplikasi pada belum maksimalnya penyusunan kajian risiko, rencana kontinjensi, serta pelaksanaan edukasi dan simulasi kebencanaan. Sementara itu, sistem informasi kebencanaan yang belum terintegrasi menyebabkan keterbatasan akses data risiko dan peringatan dini, sehingga menghambat peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

2. Layanan Peringatan Dini dan Keandalan Respon, sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Peringatan Dini dan Keandalan Respon saat Terjadi Bencana, dengan indikator
 1. Persentase Cakupan Layanan Peringatan Dini di Daerah Berisiko Bencana (%) target th 2026 6,17%
 2. Kecepatan Penyampaian Informasi Peringatan Dini Bencana ke Publik (Menit) target th 2026 <3.00^a menit.
 3. Persentase Daerah yang Menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dan Menerima Intervensi Sesuai Standar (%) target th 2026 100%

Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan peringatan dini dan keandalan respon saat terjadi bencana, dilaksanakan melalui layanan penanganan kedaruratan bencana dan penyediaan

sistem peringatan dini multiancaman bencana

Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan layanan kebencanaan, khususnya dalam meningkatkan keandalan respons saat terjadi bencana. Upaya ini dilaksanakan melalui optimalisasi layanan penanganan kedaruratan serta penyediaan sistem peringatan dini multiancaman bencana.

Namun demikian, efektivitas intervensi tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah isu yang dihadapi BPBD, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya penyebaran informasi kebencanaan, serta belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai wadah koordinasi multipihak. Keterbatasan SDM dapat berdampak pada kurang optimalnya koordinasi saat tanggap darurat sedangkan untuk sistem peringatan dini sampai saat ini belum tersedia. Di sisi lain, sistem penyebaran informasi yang belum terintegrasi berpotensi menghambat kecepatan dan ketepatan penyampaian peringatan kepada masyarakat, sehingga mengurangi efektivitas upaya penyelamatan.

Selain itu, belum adanya forum kolaboratif lintas sektor menyebabkan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan komunitas masyarakat dalam mendukung penyebaran informasi dan respons darurat belum berjalan secara optimal. Padahal, penyebaran informasi kebencanaan memerlukan dukungan jejaring yang kuat agar informasi dapat diteruskan secara cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penguatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi, serta pembentukan dan penguatan FPRB menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, sasaran Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, dengan indikator : Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang Ditangani (%) target th 2026 100%

Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana, dilaksanakan melalui layanan pemulihan pascabencana bidang fisik dan sosial, serta layanan pemulihan ekonomi terintegrasi pascabencana

Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan bagian penting dalam siklus penanggulangan bencana, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemulihan wilayah terdampak secara menyeluruh. Upaya ini dilaksanakan melalui layanan pemulihan pascabencana bidang fisik dan sosial, serta layanan pemulihan ekonomi terintegrasi guna mengembalikan fungsi pelayanan publik, kehidupan sosial masyarakat, dan aktivitas perekonomian secara bertahap dan berkelanjutan.

Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masih menghadapi sejumlah isu strategis BPBD, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pendataan dan informasi kebencanaan, serta belum terbentuknya forum kolaboratif multipihak dalam pengurangan risiko bencana. Keterbatasan SDM berdampak pada belum maksimalnya penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis kebutuhan serta prinsip *build back better*. Sementara itu, sistem data yang belum terintegrasi dapat menghambat ketepatan verifikasi kerusakan dan kerugian, yang menjadi dasar perencanaan pemulihan.

Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menyebabkan dukungan dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat dalam proses pemulihan belum terkoordinasi secara optimal. Padahal, pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana memerlukan kolaborasi lintas sektor agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal SPM menuntut pemerintah daerah untuk menjamin pelayanan dasar di bidang kebencanaan, khususnya dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana.

Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM berpotensi menghambat pemenuhan indikator pelayanan minimal, seperti penyediaan informasi rawan bencana, pelaksanaan edukasi dan simulasi kebencanaan, serta respons cepat dalam kondisi darurat. Demikian pula, belum tersedianya sistem peringatan dini yang terintegrasi dapat mempengaruhi kualitas

layanan kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari kewajiban pelayanan dasar pemerintah daerah. Selain pemenuhan SPM yang terhambat, tetapi juga kontribusi daerah terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, pembentukan forum kolaboratif, peningkatan kompetensi SDM, serta pembangunan sistem informasi dan peringatan dini yang andal menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan kebencanaan memenuhi standar minimal sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan

Oleh karena itu, perangkat daerah dituntut untuk mampu menerjemahkan prioritas nasional tersebut ke dalam program dan kegiatan yang terintegrasi dan terukur. Dalam pemenuhan SPM sub urusan wajib pelayanan dasar sub urusan bencana, perangkat daerah memiliki kewajiban memastikan indikator layanan minimal kepada Masyarakat. Lebih lanjut isu tersebut juga berdampak pada kontribusi daerah terhadap pencapaian SDGs. Kinerja perangkat daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat menghambat upaya pengurangan risiko bencana.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berpedoman pada arah kebijakan nasional. Dokumen ini menjadi tahapan awal dalam proses penyusunan RKPD yang berfungsi sebagai landasan penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, kondisi aktual di daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dilakukan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta bottom-up dan top-down planning. Secara teknokratis, perumusan program didasarkan pada analisis, capaian kinerja tahun sebelumnya, evaluasi pelaksanaan program, serta identifikasi isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik dan koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan keterpaduan perencanaan. Rancangan awal RKPD tahun 2026 memuat prioritas pembangunan daerah, sasaran dan indikator kinerja, arah kebijakan, program dan indikator pagu anggaranyang bersifat sementara. Selain itu Rancangan awal RKPD tahun 2026 juga memperhatikan pemenuhan standar pelayanan minimal, serta kontribusi

terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Rancangan awal RKPD tahun 2-26 selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Review rancangan awal RKPD dilakukan untuk mengetahui perbedaan dengan hasil analisa yang dilakukan dalam pembahasan pada forum perangkat daerah. Pada saat penyusunan RKPD awal sampai dengan ditetapkan, akan mengalami perubahan-perubahan dimana perubahan – perubahan tersebut terjadi adanya :

1. Terdapat kegiatan yang penyerapannya tidak mencapai target/sulit untuk direalisasikan sehingga pada renja 2025 perlu adanya penyesuaian anggarannya.
2. Adanya kebijakan pemerintah terkait Kemampuan Keuangan Daerah, sehingga pada penyusunan renja 2026 perlu disesuaikan.
3. Amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2008 tentang tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sehingga dalam penyusunan renja 2025 perlu untuk memunculkan sub kegiatan baru.
4. Adanya usulan – usulan kegiatan dari pemangku kepentingan pada saat musrenbang kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPBD .
5. Adanya usulan yang diperoleh dari Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang melalui penjangkaran masyarakat baik melalui kegiatan RESES DPRD maupun usulan langsung masyarakat kepada DPRD Kota Magelang.

Pada usulan rancangan awal Renja BPBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bagian dari proses perencanaan tahunan perangkat daerah, yang seluruh program kegiatan reguler sesuai tugas dan fungsi BPBD. dalam proses penyusunannya murni merupakan kegiatan reguler yang disusun oleh BPBD Kota Magelang,

Pagu usulan dalam Rancangan Renja BPBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp4.842.768.611,-. Namun demikian, setelah melalui proses pembahasan dan penelaahan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta penyesuaian berdasarkan hasil input Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) pada aplikasi SIPD-RI, pagu anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp4.714.356.224,-. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan kebijakan prioritas serta kemampuan keuangan daerah. Adapun hasil review rancangan renja BPBD Kota Magelang tahun 2026 disajikan pada table berikut :

.

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 BPBD Kota Magelang

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Magelang		100%	4.124.144.093	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Magelang		100%	4.063.581.081	
		Kota Magelang	Nilai SAKIP	90.13	-		Kota Magelang	Nilai SAKIP	90.13	-	
		Kota Magelang	Nilai KOD	40	-		Kota Magelang	Nilai KOD	40	-	
		Kota Magelang	Nilai Kearsipan	74.49	-		Kota Magelang	Nilai Kearsipan	74.49	-	
		Kota Magelang	MRI	3.001	-		Kota Magelang	MRI	3.001	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang	Cakupan terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	10.772.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang	Cakupan terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	8.081.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	1.685.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	1.257.800	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	609.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	456.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	609.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	456.300	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	658.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	495.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	658.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1dokumen	495.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	13 laporan	6.552.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	13 laporan	4.921.500	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Cakupan terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	100%	3.687.295.528	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100%	3.686.072.128	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	3.679.509.028	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	3.679.509.028	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	564.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	419.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 laporan	7.221.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	6.143.200	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Magelang	Cakupan terpenuhnya administrasi Umum perangkat daerah	100%	106.925.443	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Magelang	Persentasi administrasi umum yang tersedia	100%	77.118.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.387.843	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.386.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	1.548.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	1.487.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	25.860.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	25.811.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	8.090.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	6.061.600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 dokumen	3.240.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.240.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Undangan yang Disediakan								
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	10.178.500	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	10.155.200	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	960.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	720.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	54.652.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	27.256.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Cakupan terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	19.975.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Persentase Unit Pengadaan Barang Mlik Daerah	100%	19.975.200	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	19.975.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	19.975.200	Sebagian telah masuk di perubahan 2022 dan yg lain diusulkan di perubahan 2023

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang	Cakupan terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	142.008.885	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang	Persentase peyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	149.123.580	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20.204.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	15.429.900	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	78.672.261	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	78.672.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	43.132.224	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	55.021.680	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang	Cakupan terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	157.166.437	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang	Persentase barang milikk daerah yang dipelihara	100%	123.210.273	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	95.973.241	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	73.654.888	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	50.017.948	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	38.380.800	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	11.175.584	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	11.174.585	
	Program Penanggulangan Bencana	Kota Magelang	Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	0.98	483.955.278	Program Penanggulangan Bencana	Kota Magelang	Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	0.98%	0.98%	
		Kota Magelang	Presentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	210.687.140			Presentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Magelang	Presentase penanganan pascabencana	100%	24.000.100			Presentase penanganan pascabencana	100%	100%	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah kegiatan sosialisasi informasi rawan bencana	1 kegiatan	23.260.800	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah kegiatan sosialisasi informasi rawan bencana	1 kegiatan	15.787.100	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya di Kota Magelang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	120 orang	23.260.800	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Magelang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60 orang	15.787.100	Sumber dana Dari Insentif Fiskal dengan jenis kegiatan Bidang Penurunan Kemiskinan, serta merupakan kegiatan pendukung Responsif Gender

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keg Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Magelang	Jumlah kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan	8 kegiatan	460.694.478	Keg Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Magelang	Jumlah kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan	8 kegiatan	435.928.883	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Magelang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	18 unit	56.915.750	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Magelang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	18 unit	55.508.900	Terdapat anggaran belanja HIBAH kpd Garda Relawan Indonesia
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Magelang	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	120 oang	11.802.100	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Magelang	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	120 orang	9.162.900	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kelurahan Panjang & Kel Cacaban	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 kawasan	24.935.800	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kelurahan Kelurahan Panjang & Kel Cacaban	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan	12.701.300	Terdapat anggaran Usulan masyarkat melalui RKM dari Kel. Rejowinangun selatan
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Tim TRC yan telah dibentuk BPBD dengan keputusan Ka OPD	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 orang	28.303.200	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Tim TRC yan telah dibentuk BPBD dengan keputusan Ka OPD	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	24.901.100	
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	75.609.900	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	71.800.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	231.616.128	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	237.747.583	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 kawasan	31.511.600	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 kawasan	24.107.100	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Magelang	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	210.687.140	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Magelang	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	184.006.760	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kota Magelang	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4 laporan	5.759.040	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kota Magelang	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4 laporan	5.161.040	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 dokumen	157.119.500	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 dokumen	134.546.420	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan	1 orang	3.500.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	Kota Magelang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan	1 orang	3.900.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			Bencana Kabupaten/Kota		Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 orang	35.954.600	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 orang	33.231.600	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 laporan	8.354.000	Aktivasi Sistem Komando	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 laporrn	7.167.700	
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Magelang	Jumlah kegiatan penataan sisten dasar penanggulangan bencana	1 kgiatan	24.100.100	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencan	1 kegiatan	15.052.400	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	12 kegiatan	24.100.100	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	12 dokumen	15.052.400	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) secara partisipatif. Keterlibatan tersebut terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja.

Penjabaran RKPD selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, termasuk Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dokumen Renja BPBD memuat program dan kegiatan yang merupakan turunan langsung dari prioritas dan sasaran pembangunan daerah, khususnya pada urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.

Usulan – usulan yang ditampung dalam dokumen renja antara lain hasil kegiatan :

1. Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota
2. Evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, serta kebutuhan riil di lapangan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD
3. Hasil Pokok pikiran dewan pada saat kegiatan RESES DPRD maupun usulan langsung masyarakat kepada DPRD.

Namun demikian, pada penyusunan Renja BPBD Tahun 2026 tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan eksternal. Hal ini disebabkan karena seluruh program dan kegiatan yang direncanakan merupakan kegiatan reguler yang sebagian besar bersifat mandatory, mengacu pada prioritas daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana, serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Dengan demikian, substansi Renja BPBD Tahun 2026 lebih difokuskan pada penguatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi pelayanan penanggulangan bencana sesuai dengan arah kebijakan dalam RKPD.

**Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Magelang Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1		NIHIL			
2					
3					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

RKP tahun 2026 tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” , tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “ Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2024”. Pada RKP 2026 memberikan penekanan pada kunci utama yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik. RKP tahun 2026 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMN 2025-2029.

Tema di atas menegaskan bahwa pembangunan nasional sangat ditentukan oleh ketahanan sektor pangan, energi. Dalam konteks tersebut, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana memiliki keterkaitan yang strategis karena ketahanan pembangunan tidak hanya dapat tercapai tanpa pengelolaan risiko bencana yang efektif misalnya:

1. BPBD berperan menjaga keberlanjutan produksi dan distribusi pangan di daerah, sehingga stabilitas ketahanan pangan tetap terpelihara melalui : Disusunnya kajian risiko bencana, Rencana Kontijensi, Sistem Peringatan dini dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
2. BPBD berperan dalam mitigasi dan koordinasi lintas sektor dalam : mengurangi risiko kerusakan infrastruktur vital, mempercepat pemulihan layanan energi pascabencana, menjamin keberlangsungan pelayanan pelayanan dasar masyarakat.
3. Bencana berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi serta memperburuk kondisi kelompok rentan, melalui fungsi tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi , BPBD dapat : mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, melinsungi UMKM dan sektor informal terdampak, serta memastikan bantuan menjangkau kelompok rentan secara adil.
4. Sejalan dengan arah RKP Tahun 2026, penyelenggaraan penanggulangan bencana juga mendukung : Pembangunan berketahanan iklim melalui adaptasi risiko hidrometeorologi, transformasi digital melalui penguatan sistem informasi

kebencanaan.

Dengan demikian tugas dan fungsi BPBD tidak hanya berorientasi pada penanganan bencana semata, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan tema RKP Tahun 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan dokumen perencanaan tahunan pemerintah. Perumusan tujuan dan sasaran ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki arah yang jelas, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Tujuan perangkat daerah disusun sebagai kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan secara lebih spesifik dan terukur dalam periode perencanaan tertentu. Keduanya dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis, permasalahan pelayanan, capaian kinerja sebelumnya, serta kebijakan nasional dan daerah yang relevan.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan, tujuan dan sasaran perangkat daerah juga berperan sebagai dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan, sekaligus menjadi acuan dalam pengukuran kinerja melalui indikator yang terukur dan realistis. Dengan demikian, tujuan dan sasaran tidak hanya menjadi pernyataan normatif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran yang tepat akan memperkuat kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Tujuan yang ditetapkan oleh BPBD Kota Magelang sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra BPBD Kota Magelang Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana dengan indikatornya adalah Indeks Ketahanan Daerah. Pada tahun 2026 target Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,49. Ketahanan daerah tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan dalam merespon kejadian bencana, tetapi juga mencakup aspek

pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat , hingga rehabilitasi dan rekonstruksi secara terencana .

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yaitu Meningkatkan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana dengan indikator :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan target 0.81
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu target 0.6
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik target 0.70
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana target 0.75
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana target 0.49
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana target 0.34
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana target 0.36

Sasaran ini menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, system informasi kebencanaan, sarana prasarana, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Peningkatan kapasitas menjadi faktor utama dalam merunkan risiko bencana. Tujuan dan sasaran BPBD Kota Magelang tidak hanya berorientasi pada aspek responsif, tetapi juga bersifat preventif melalui perencanaan yang terarah, indikator kinerja yang terukur, serta sinergitas lintas sektor. BPBD berkontribusi dalam menciptakan daerah aman, tangguh, dan berdaya tahan terhadap ancaman bencana, sekaligus mendukung stabilitas Pembangunan Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, perumusan program dan kegiatan tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan komprehensif dan terintegrasi dengan arah kebijakan Pembangunan daerah. Penyusunan Renja BPBD mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang menjadi landasan dalam menentukan prioritas, target, serta indikator kinerja perangkat daerah.

Pertama, pemusunan program dan kegiatan mengacu pada visi, misi, serta agenda prioritas kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen

perencanaan jangka menengah daerah. Visi Pembangunan daerah yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan Masyarakat menjadi dasar bagi BPBD untuk memperkuat aspek ketangguhan daerah terhadap bencana. Visi Kota Magelang 2025-2029 : “ Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman, dan Berkelanjutan” . Visi tersebut dijelaskan kedalam 6 unsur Visi yakni : Kota Perdagangan dan Jasa, Harmonis, Humanis, Nyaman, Berkelanjutan, dan Aspek Sumber Daya Manusia. Masing-masing unsur memiliki makna yang saling melengkapi dan menjadi dasar arah pembangunan Kota Magelang secara menyeluruh, keberlanjutan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Unsur Nyaman dalam visi pembangunan Kota Magelang mencerminkan kondisi kota yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, BPBD berperan penting menjaga rasa aman melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana secara cepat dan tepat, sehingga masyarakat terlindungi dari potensi risiko bencana yang dapat mengganggu kenyamanan hidup dan aktivitas sosial-ekonomi.

Sedangkan, unsur Berkelanjutan menekankan pentingnya pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. BPBD berkontribusi dalam memastikan keberlanjutan tersebut melalui pengendalian risiko bencana, adaptasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan mitigasi bencana, serta penguatan ketahanan masyarakat, sehingga pembangunan yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada masa kini, tetapi juga masa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi tersebut lebih konkrit Kota Magelang telah menetapkan 6 misi Pembangunan yaitu :

1. Menciptakan masyarakat yang bermartabat
2. Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan
3. Menciptakan keharmonisan antar umat beragama
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

5. Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan, misi yang relevan adalah Misi Kedua, yaitu: 'Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan'. Masyarakat yang berkualitas, harmonis, bermartabat membutuhkan wadah yang nyaman, yaitu lingkungan tempat tinggal yang sehat, nyaman dan berkualitas. Selain itu dukungan infrastruktur yang memadai diperlukan sebagai pendorong percepatan proses pembentukan kondisi masyarakat yang dikehendaki. Inovasi dalam penyediaan infrastruktur menjadi prioritas. Misi ini menekankan penguatan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas, mitigasi bencana, dan daya saing Kota Magelang, termasuk transportasi publik, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, serta infrastruktur hijau yang adaptif terhadap perubahan iklim. Misi ini juga mengupayakan terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah, penurunan gas emisi rumah kaca, dan pemasyarakatan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, penguatan sistem ketahanan pangan juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, melalui optimalisasi lahan perkotaan, distribusi pangan yang efisien, dan pengurangan limbah pangan. Misi ini hendak mewujudkan pembangunan sarana prasarana yang terkoneksi dengan upaya menurunkan risiko bencana, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan misi ini

Kedua, pencapaian tujuan dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), turut menjadi pertimbangan. Penanggulangan bencana memiliki keterkaitan erat dengan beberapa tujuan SDGs, antara lain pengentasan kemiskinan, pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta penanganan perubahan iklim. Oleh karena itu, program dan kegiatan BPBD diarahkan untuk mendukung pengurangan kerentanan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi terhadap dampak bencana.

Rumusan program dan kegiatan di dalam renja 2026 juga mempertimbangkan pencapaian tujuan dan Indikator SDGs :

- Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) Indikator
 - 1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
 - 1.5.2 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB
- Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) Indikator
 - 11.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
 - 11.5.2.a Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB
- Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim) Indikator
 - 13.1.1 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Implementasi atas indikator – indikator diatas di dijawab melalui Sub kegiatan yang mendukung :

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Ketiga, aspek penurunan angka kemiskinan menjadi faktor penting dalam penyusunan program. Bencana seringkali memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan baru. Dengan demikian, program penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada aspek tanggap darurat, tetapi juga mencakup penguatan mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang berorientasi pada pemulihan ekonomi Masyarakat, Selain penurunan angka kemiskinan melalui tahap pascabencana, penurunan kemiskinan secara tidak langsung didukung melalui kegiatan prabencana, Dimana pada beberapa indikator subkegiatan targetnya langsung mengarah kepada kelompok rentan,

dimana salah satu kelompok rentan menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah fakir miskin, yaitu

1. Subkegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) dengan indikator Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun.

Keterkaitan subkegiatan ini dengan penurunan kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan pengetahuan kebencanaan berkontribusi pada pengurangan risiko kerugian ekonomi, khususnya ekonomi rumah tangga. Masyarakat memahami karakteristik ancaman, jalur evakuasi, prosedur penyelamatan, serta langkah mitigasi mandiri akan lebih mampu melindungi diri, aset produktif, tempat tinggal sehingga potensi kehilangan pendapatan dapat diminimalkan
 - ✓ Kedua, kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak merupakan pihak yang paling terdampak ketika terjadi bencana. Melalui KIE berbasis jenis ancaman, kapasitas adaptif kelompok rentan dapat ditingkatkan, sehingga mereka memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi risiko. Hal ini penting karena kemiskinan dan kerentanan bencana saling berkaitan : kemiskinan meningkatkan risiko terdampak bencana, sementara bencana memperparah kemiskinan
2. Subkegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Keterkaitan dengan penurunan kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - ✓ Pertama, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana

meningkatkan keterampilan praktis masyarakat dalam mengurangi risiko kerusakan aset dan sumber penghidupan. Masyarakat yang terlatih mampu melakukan langkah-langkah mitigasi sederhana seperti penguatan struktur rumah, perlindungan dokumen penting, pengamanan alat produksi,. Upaya ini secara langsung menekan potensi kerugian ekonomi saat bencana terjadi, sehingga mengurangi risiko masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan.

Serta Sub lain yang secara tidak langsung penurunan kemiskinan, seperti pembentukan kelurahan Tangguh bencana, penyediaan logistik kedaruratan, serta kegiatan yang sifatnya pelatihan ataupun gladi/simulasi.

Keempat, pencapaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi rujukan dalam menentukan jenis dan kualitas layanan yang harus disediakan oleh BPBD. Hal ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta mampu menjamin hak masyarakat atas layanan penanggulangan bencana. Adapun program kegiatan yang langsung mendukung ketercapaian SPM adalah Program penanggulangan bencana dengan 3 kegiatannya yaitu :

- ✓ Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- ✓ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dan
- ✓ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kelima, pendayagunaan potensi ekonomi daerah juga menjadi pertimbangan dalam mendesain program dan kegiatan. Ketahanan ekonomi lokal yang kuat akan mempercepat proses pemulihan pascabencana serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Oleh karena itu, sinergi dengan sektor usaha, optimalisasi sumber daya lokal, serta penguatan kemitraan multipihak menjadi bagian dari strategi implementasi program BPBD.

Adapun rumusan program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	-	Kota Magelang	100%	4.203,910.281	DAU	-	100%	4.229.432.562
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-	Kota Magelang	100%	4.203,910.281	DAU	-	100%	4.229.432.562
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perkantoran	Kota Magelang	100%	4.203,910.281	DAU	-	100%	4.229.432.562
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	Kota Magelang	100%	4.585.100	DAU	-	100%	11.614.388
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kota Magelang	3 dok	1.257.800	DAU	-	2 dok	2.581.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	1 dok	373.300	DAU	-	1 dok	634.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	1 dok	373.300	DAU	-	1 dok	634.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kota Magelang	1 dok	495.000	DAU	-	1 dok	754.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dokumen DPA- SKPD							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	1 dok	423.500	DAU	-	1 dok	754.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	13 lap	1.662.200	DAU	-	12 lap	6.255.288
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	Kota Magelang	100%	3.887.984.533	DAU	-	100%	3.679.509.028
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	18 org	3.882.968.433	DAU	-	16 org	3.679.509.028
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Magelang	1 lap	333.700	DAU	-	1 lap	571.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Magelang	12 lap	4.682.400	DAU	-	12 lap	7.603.100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi administrasi umum yang tersedia	Kota Magelang	100%	75.428.400	DAU	-	100%	155.287.200
	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Kota	4 paket	2,386.600	DAU	-	1 paket	3.000.000

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintaan Daerah dan Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat atan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Magelang						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	2 paket	798.000	DAU	-	1 paket	3.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	12 paket	24,811.000	DAU	-	4 paket	32.000.000
	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Magelang	8 paket	6.061.600	DAU	-	2 paket	10.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Magelang	2 dok	3.240.000	DAU	-	3 dok	5.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Magelang	12 lap	10.155.200	DAU	-	12 lap	20.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	12 lap	720.000	DAU	-	12 lap	1.050.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	12 lap	27.256.000	DAU	-	12 lap	81.237.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ururan Pemerintah Daerah	Cakupan terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Magelang	100%	4.000.000	DAU		100%	25.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	2 Unit	4.000.000	DAU		2 Unit	25.000.00011
	Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah	Persentase peyediaan jasa penunjang ururan pemerintah daerah yang tersedia	Kota Magelang	100%	114.828.560	DAU	-	100%	147.802.446
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	12 lap	12.634.700	DAU	-	12 lap	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Magelang	12 lap	59.277.600	DAU	-	12 lap	80.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	12 lap	42.916.260	DAU	-	12 lap	42.802.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kota Magelang	100%	117.083.688	DAU	-	100%	202.045.400
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Magelang	11 unit	69.738.888	DAU	-	11 unit	100.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Magelang	2 unit	38.380.800	DAU	-	2 unit	55.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Magelang	8 unit	8.964.000	DAU	-	8 unit	2.045.400
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Magelang	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Magelang	-	-	-	-	-	-
	Program Penanggulangan	Persentase Layanan penanggulangan bencana	Kota Magelang	100%	783.449.488	DAU	-	100%	1.295.921.818
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Magelang	100%	14.807.100	DAU	-	100%	33.770.880

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Magelang	60 org	14.807.100	DIF	-	300 org	33.770.880
	Keg Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Kota Magelang	100%	576.572.128	DAU		100%	857.041.400
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di 70awasan tempat tinggalnya	Kota Magelang	18 unit	48.255.510	DAU	-	25 Unit	231.010.450
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kota Magelang	120 org	8.462.900	DAU	-	175 org	12.982.310
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Magelang	1 kawasan	12.701.300	DAU	-	-	42.296.540
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kota Magelang	30 org	19.730.300	DAU	-	30 org	31.133.520

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kota Magelang	1 dok	71.000.000	DAU	-	1 dok	94.445.560
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di 71awasan tempat tinggalnya	Kota Magelang	12 lap	163.465.818	DAU	-	12 lap	285.172.660
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kota Magelang	1 dok	234.641.200	DAU	0	0	0
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Magelang	2 kawasan	18.315.100	DAU	-	-	150.000.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kota Magelang	100%	177.319.060	DAU	-	100%	354.073.428
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kota Magelang	4 lap	4.286.940	DAU	-	4 lap	6.695.794

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kota Magelang	2 dok	133.907.220	DAU	-	2 dok	225.275.974
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Magelang	1 org	3.900.000	DAU	-	1 org	21.000.000
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Magelang	20 org	28.857.200	DAU	-	60 org	73.374.950
	Aktivasi Sistem Komando	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kota Magelang	1 lap	6.367.700	DAU	-	1 lap	27.726.710
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersedia	Kota Magelang	100%	14.751.200	DAU	-	-	61.036.470
	Koordinasi dan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kota Magelang	12 keg	14.751.200	DAU	-	12 keg	61.036.470

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), penyusunan Rencana Kerja (Renja) memuat garis besar rekapitulasi program dan kegiatan. Rekapitulasi ini memberikan gambaran

menyeluruh mengenai jumlah program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sekaligus menunjukkan konsistensi perencanaan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah serta kebijakan nasional. Secara umum, program dan kegiatan yang direncanakan disusun berdasarkan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya, kebutuhan riil di lapangan, serta kemampuan keuangan daerah. Jumlah program dan kegiatan yang termuat dalam Renja mencerminkan fokus intervensi BPBD pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rekapitulasi ini tidak hanya menunjukkan kuantitas program dan kegiatan, tetapi juga menggambarkan arah kebijakan pembangunan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Setiap program dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan perangkat daerah, serta mewujudkan sasarannya. Pada perencanaan tahun 2026 BPBD Kota Magelang merencanakan 10 kegiatan serta 40 subkegiatan, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 4.987.359.769,- yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kota Magelang. Pada proses penyusunan renja tahun 2026 ini terdapat perubahan yang cukup signifikan, sejumlah subkegiatan mengalami pengurangan volume kegiatan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah, selain itu dilakukan rasionalisasi belanja seperti perjalanan dinas serta belanja makan minum rapat maupun makan minum kegiatan aktivitas lapangan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun anggaran 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 merencanakan 10 kegiatan yang dijabarkan ke dalam 40 subkegiatan. Program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan perangkat daerah yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana serta mewujudkan sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana. Total kebutuhan anggaran yang direncanakan sebesar Rp 4.987.359.769,-. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penanggulangan bencana. Pengalokasian anggaran dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan skala prioritas, urgensi kebutuhan daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Selain itu, dalam proses penyusunannya dilakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen belanja guna menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi fokus pada pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada perencanaan Tahun Anggaran 2026, salah satu target prioritas yang ditetapkan adalah pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Magelang. Dokumen RPB yang saat ini masih digunakan merupakan dokumen yang disusun oleh Bappeda pada tahun 2018 dan masa berlakunya telah berakhir, sehingga sudah tidak sepenuhnya relevan dengan dinamika perkembangan risiko bencana, kebijakan nasional, maupun kondisi sosial dan tata ruang terkini di Kota Magelang. Sebagai tindak lanjut, pada Tahun 2026 direncanakan pelaksanaan Subkegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota guna memperbarui dokumen tersebut secara komprehensif. Selain itu, dokumen yang diperbarui juga akan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah serta regulasi terbaru di bidang penanggulangan bencana. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, serta unsur masyarakat, sehingga dokumen RPB yang dihasilkan bersifat implementatif dan dapat menjadi pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan tersusunnya RPB yang mutakhir, diharapkan arah kebijakan dan langkah penanggulangan bencana di Kota Magelang menjadi lebih terencana, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan risiko yang ada, sekaligus mendukung peningkatan kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Hasil analisis kebutuhan renja BPBD tahun anggaran 2026 sebagaimana rincian pada tabel berikut merupakan gambaran komprehensif mengenai kebutuhan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Analisis tersebut disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis kebencanaan, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026. Rincian pada tabel tersebut memuat uraian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kebutuhan pagu anggarannya, yang telah disusun secara rasional dan proporsional sesuai dengan prioritas serta kemampuan keuangan daerah. Penyusunan kebutuhan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan target kinerja yang ingin dicapai, standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

NO	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran				Jumlah
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1.172.637.870	1.209.102.670	1.136.482.165	1.469.137.064	4.987.359.769
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.054.789.470	1.050.164.970	1.050.165.070	1.048.790.771	4.203.910.281
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	910.550	1.417.750	1.417.750	839.050	4.585.100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	628.900	628.900	-	1.257.800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	373.300	-	-	373.300
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	373.300	-	373.300
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	495.000	-	-	-	495.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	423.500	423.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	415.550	415.550	415.550	415.550	1.662.200
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	972.246.408	971.912.708	971.912.708	971.912.709	3.887.984.533
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	970.742.108	970.742.108	970.742.108	970.742.109	3.882.968.433
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	333.700	-	-	-	333.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.170.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600	4.682.400

NO	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran				Jumlah
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		1.172.637.870	1.209.102.670	1.136.482.165	1.469.137.064	4.987.359.769
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.654.450	18.856.450	18.856.550	18.060.950	75.428.400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	795.500	795.500	795.600	-	2.386.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	798.000	-	-	-	798.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.202.750	6.202.750	6.202.750	6.202.750	24.811.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.515.400	1.515.400	1.515.400	1.515.400	6.061.600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	810.000	810.000	810.000	810.000	3.240.000
	Penyediaan Bahan/Material	2.538.800	2.538.800	2.538.800	2.538.800	10.155.200
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.814.000	6.814.000	6.814.000	6.814.000	27.256.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000.000	-	-	-	4.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	-	-	-	4.000.000
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.707.140	28.707.140	28.707.140	28.707.140	114.828.560
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.158.675	3.158.675	3.158.675	3.158.675	12.634.700
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.819.400	14.819.400	14.819.400	14.819.400	59.277.600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.729.065	10.729.065	10.729.065	10.729.065	42.916.260
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.270.922	29.270.922	29.270.922	29.270.922	117.083.688
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.434.722	17.434.722	17.434.722	17.434.722	69.738.888
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.595.200	9.595.200	9.595.200	9.595.200	38.380.800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.241.000	2.241.000	2.241.000	2.241.000	8.964.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	117.848.400	158.937.700	86.317.095	420.346.293	783.449.488
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	7.403.550	7.403.550	-	-	14.807.100

NO	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran				Jumlah
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		1.172.637.870	1.209.102.670	1.136.482.165	1.469.137.064	4.987.359.769
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	7.403.550	7.403.550	-	-	14.807.100
	Keg Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	64.994.210	100.949.660	40.866.455	369.761.803	576.572.128
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	24.127.755	24.127.755	-	-	48.255.510
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	4.231.450	-	4.231.450	8.462.900
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	12.701.300	-		12.701.300
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	9.865.150	-	9.865.150	19.730.300
	Penyusunan Rencana Kontijensi	-	-	-	71.000.000	71.000.000
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	40.866.455	40.866.455	40.866.455	40.866.453	163.465.818
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	234.641.200	234.641.200
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	9.157.550	-	9.157.550	18.315.100
	Keg. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana	41.762.840	46.896.690	41.762.840	46.896.690	177.319.060
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1.071.735	1.071.735	1.071.735	1.071.735	4.286.940
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	33.476.805	33.476.805	33.476.805	33.476.805	133.907.220
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	1.950.000	-	1.950.000	3.900.000
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7.214.300	7.214.300	7.214.300	7.214.300	28.857.200
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	3.183.850	-	3.183.850	6.367.700
	Keg. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	3.687.800	3.687.800	3.687.800	3.687.800	14.751.200
	Koordinasi dan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	3.687.800	3.687.800	3.687.800	3.687.800	14.751.200

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, analisis kebutuhan, serta penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

- Terhadap indikator kinerja subkegiatan terdapat kemungkinan tidak seluruhnya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan sebagian subkegiatan teknis merupakan kegiatan yang bersifat mandatori dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana. Karakteristik kegiatan tersebut pada dasarnya bersifat kontinjensi atau cadangan, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi dan kejadian bencana di lapangan. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun anggaran tidak terjadi bencana dengan skala atau intensitas tertentu, maka realisasi output pada subkegiatan tersebut dapat berada di bawah target yang direncanakan bahkan tidak tercapai.

Dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu segera ditindaklanjuti guna memperkuat tata kelola penanggulangan bencana di Kota Magelang. Salah satunya adalah melakukan pemutakhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Magelang agar sesuai dengan perkembangan risiko bencana, dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kondisi sosial dan tata ruang terkini. Pembaruan dokumen ini penting untuk memastikan arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana tetap relevan, terukur, dan implementatif.

Selain itu, perlu dilakukan legalisasi terhadap seluruh dokumen penanggulangan bencana yang telah disusun, baik melalui penetapan dalam bentuk peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Legalisasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, serta memperkuat posisi dokumen sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Dengan adanya pemutakhiran dan legalisasi dokumen secara menyeluruh, diharapkan sistem penanggulangan bencana di Kota Magelang semakin tertata,

terkoordinasi,

Dengan disusunnya Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2026 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih terarah, terencana, dan terukur sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Renja ini menjadi pedoman operasional dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan anggaran, guna mendukung peningkatan kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Selain itu, Renja Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dokumen ini juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja sehingga setiap pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel

Melalui implementasi Renja yang konsisten dan adaptif terhadap dinamika risiko bencana, diharapkan terwujud peningkatan ketahanan Kota Magelang dalam menghadapi bencana serta tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan secara optimal.

Magelang, Juli 2025

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG



MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd

NIP. 19651203 198902 1 002